



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SELASA, 5 JUNI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kepala OPD Siap Dicotot

Jika Tak Tindaklanjuti Temuan BPK

KOTA MANNA, BE - Banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap pengelolaan keuangan Bengkulu Selatan (BS), hingga menyebabkan BS kembali gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) langsung ditindaklanjuti pelaksana tugas (plt) Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM. Dirinya langsung mengumpulkan seluruh kepala OPD, serta menantangnya agar serius menindaklanjuti temuan tersebut. "Saya minta komitmen semua kepala OPD menindaklanjuti

temuan BPK, jika tidak tuntas harap mengundurkan diri dari jabatannya atau siap dicopot," katanya saat memimpin rapat di ruang rapat kantor Bupati BS, Senin (4/6).

Gusnan mengatakan, dari temuan BPK tersebut, ada 11 OPD yang disorot. Sebab di 11 OPD tersebut banyaknya temuan aset yang belum tuntas, serta ada temuan kerugian negara. Ke-11 OPD tersebut yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinkes, Sekretariat DPRD BS, Dinas Pertanian, Dinas Dikbud, Kantor Kecamatan Manna, BPPKB, BPKAD, Sekretariat Pemda BS dan RSUD-HD Manna BS.

"Saya minta dalam dua minggu ke depan sudah ada perkembangan kegiatan me-

nindaklanjuti temuan tersebut," ujarnya.

Sebab, sambung Gusnan, waktu yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut hanya 2 bulan atau 60 hari sejak Laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan ke Pemda BS 28 Mei lalu. Sehingga jika tidak selesai, maka tahun 2019, BS akan kembali meraih predikat WDP.

"Saya ingin 2019 kita meraih WTP, silahkan mulai ditelusuri, jika ada kerugian negara yang tidak dikembalikan, kita laporkan ke aparat penegak hukum," tandas Gusnan.

Penjabat Sekkab BS, Ir H Nurmansyah Samid mengatakan, temuan BPK tersebut diantaranya masih banyaknya aset yang tidak jelas. Bahkan

dirinya memastikan hingga saat ini aset yang tidak jelas masih ada senilai Rp 88 Miliar lagi. Selain itu, ada kelebihan bayar hingga volume kurang pada kegiatan pembangunan, seperti ada beberapa proyek jalan di dinas PU, kemudian proyek di dinas kesehatan. Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan, semua OPD dapat bekerja maksimal menuntaskan temuan tersebut. "Saya mohon waktu 2 bulan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin menuntaskan temuan BPK, jangan sampai tahun 2019 nanti kita kembali meraih WDP karena masalah temuan BPK yang tidak selesai kita tindaklanjuti," tandas Nurmansyah Samid.

Kepala Dinas Kesehatan,

M Redhwan Arief S Sos MPH mengatakan, di dinasnya temuan aset ada di beberapa puskesmas seperti aset gunting atau sarung tangan tahun 1999 lalu. Kemudian ada juga proyek seperti pembangunan gedung di rumah sakit yang uangnya jaminannya belum dikembalikan sebesar Rp 255 Miliar. Kemudian pembangunan ruang bebas rokok yang kerugiannya sekitar Rp 24 juta. Dengan adanya komitmen tersebut, dirinya mengaku siap menindaklanjutinya dan memastikan waktu 60 hari semua temuan tersebut tuntas. "Saya siap mentaati komitmen tersebut, insya allah waktu 2 bulan ini, semua temuan BPK dapat kami tuntaskan," demikian M Arief. (369)